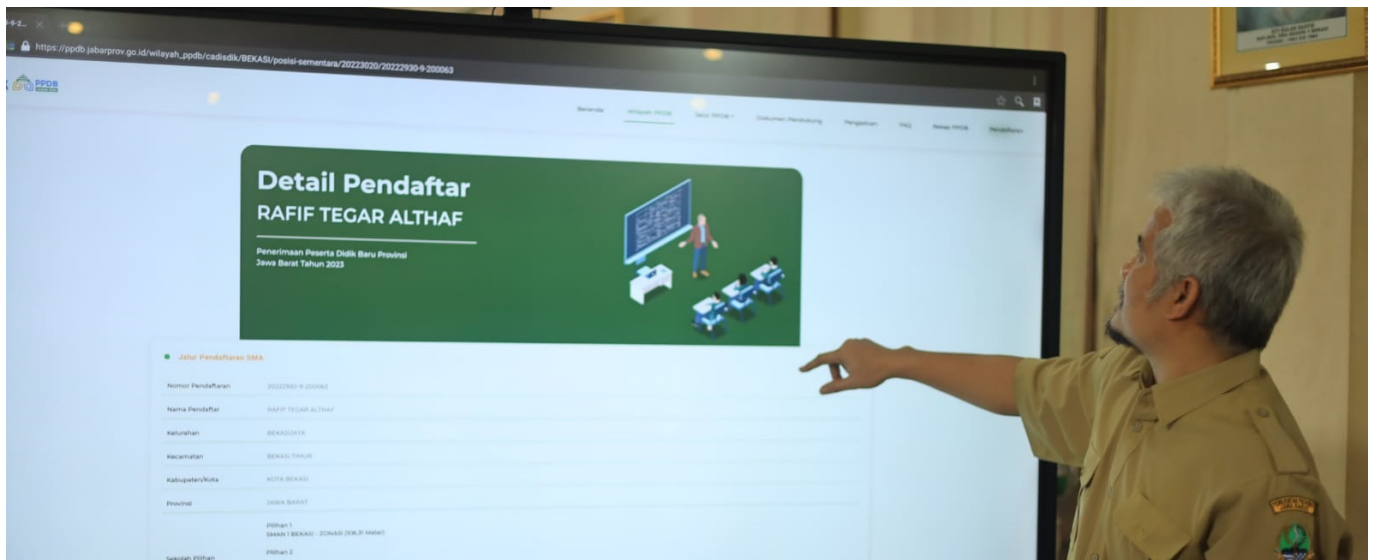


PLT. WALI KOTA BEKASI TRI ADHANTO SIDAK SMA NEGERI 1 TERKAIT ISU KECURANGAN PPDB ONLINE

KOTA BEKASI, Prolite – Beredarnya pemberitaan dimedia sosial terkait dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oknum terkait mekanisme PPDB Online, Tri Adhianto selaku Plt. Wali Kota Bekasi didampingi Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Dhany Aryanda Lakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke SMA Negeri 1 Kota Bekasi, Senin (10/07).

Sidak tersebut didasari adanya isu kecurangan PPDB Online yang dilakukan oleh oknum terkait penerimaan siswa lewat jalur zonasi, dan ada pula dugaan penggunaan *fake gps* yang diterapkan untuk mengelabui sistem zonasi PPDB Online.



Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Hadiri Konferensi Kerja I PGRI dengan Masa Bakti XXIII Tahun 2025-2030

Dalam kunjungan tersebut, tampak hadir pula Kadisdik Kota Bekasi UU Saeful Mikdar dan Kadisdukcapil Kota Bekasi Taufik R Hidayat, guna membantu menjawab permasalahan terkait isu tersebut.

Dari hasil Sidak tersebut, Plt. Wali Kota Bekasi bersama jajaran menemukan adanya perpindahan domisili siswa dari alamat orang tua ke alamat saudara dengan kurun waktu kurang lebih satu tahun, yang di mana alamat tersebut masuk ke dalam zonasi sekolah.

“Jadi tadi pas kita sinkronkan terkait zonasi sekolah dan domisili siswa, memang didapati ada beberapa anak yang domisilinya *tuh* pindah dari rumah yang lama pindah ke zona tersebut, secara aturan dari dukcapil, selama yang punya rumah tersebut tidak keberatan untuk dijadikan tempat tinggal, hal tersebut sah-sah saja, yang perlu kita pertanyakan kenapa yang punya rumah *gak* keberatan, dan RT nya pun mau tandatangan keterangan domisili, ini yang akan kita selidiki lebih lanjut,” ungkap Plt. Wali Kota Bekasi.

Baca Juga: Ketua Komisi II mendesak acara “Pesona Nusantara Bekasi Keren” agar dibatalkan, Pemkot Tidak Peka di Tengah Duka Nasional

Kesimpulan dari sidak tersebut, Pria yang kerap disapa Mas Tri tidak menemukan kecurangan yang dilakukan oleh operator atau pihak sekolah, melainkan adanya beberapa sistem yang perlu disempurnakan.

“Jadi hal tersebut akan kita tindak lanjuti, dan akan kita *up* ke KCD Korwil 3, yang kemudian kita *up* juga ke Kemendikbud, yang dimana diperlukan adanya penyempurnaan sistem demi kenyamanan bersama, harapan saya warga jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu hoaks, tetap jaga kondusifitas di wilayah, warga masyarakat tenang, proses PPDB pun dapat berjalan dengan khidmat,” Pungkas Tri Adhianto.



Baca Selanjutnya

CDOB Disetujui : Idealnya Provinsi Jawa Barat Miliki 40 Kota-Kabupaten